

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Ma'Mun, Bc.I.P., S.H., M.H.

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H.

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

T. Daniel L Tobing, S.H.,

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

RR. Risma Indriyani, S.H.,M.Hum

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU (Hukum Ekonomi,BALITBANGKUMHAM)

Syprianus Aristieus, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

Jamilus, S.H.,M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, SH.,M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H, M.H.(Hukum Tata Negara,BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H., (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H.,M.Si.

Jaya Laksana, S.E

Sekretariat

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Mitra Bebestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
(Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto)
2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A.
(Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta)
3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd.
(Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta)
4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL.
(Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
(Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email :

balitbangkumham@gmail
jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
ADVERTORIAL	
KUMPULAN ABSTRAK	
Perubahan Tataan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (<i>The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten Province</i>).....	309- 328
Otom Mustomi	
Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (<i>An Conflict Accomplishment of Blasphemy in Indonesia`s Criminal Law Perspective</i>).....	329 - 350
Ahmad Jazuli	
Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika(<i>Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses</i>).....	351 - 363
Novita Sari	
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (<i>The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions</i>).....	365 -379
Ulang Mangun Sosiawan	
Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (<i>Justice for Convicts at the Correctional Institutions</i>).....	381 - 394
Penny Naluria Utami	
Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM (<i>Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective</i>)	395 - 412
Oki Wahyu Budijanto	
Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang(<i>The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation Termination of Criminal Act of Money Politic</i>).....	413 - 425
Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin	
Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia (<i>The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia</i>)	427 - 445
Mei Susanto	
BIODATA PENULIS	447 - 449
PEDOMAN PENULISAN	451 - 453

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 17 Nomor 3 September 2017.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 8 (delapan) tulisan dengan beberapa topik dari hasil penelitian peneliti di berbagai instansi dan lembaga baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Di momen ulang tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-72 tahun 2017 ini kita berharap hukum di negeri ini akan dapat lebih berwibawa. Pada tahap pembangunan nasional dewasa ini, masalah wibawa hukum menjadi bertambah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peranan hukum diharapkan lebih dominan, baik untuk memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai, mengarahkan upaya peningkatan pembangunan, maupun untuk memantapkan kehidupan sosial dan budaya. Sehingga, setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang akan terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan, sebagai akibat berhasilnya pembangunan, memerlukan kewibawaan hukum yang memberi rasa aman, rasa tenteram dan tertib dalam masyarakat.

Tanpa hukum yang berwibawa, maka tujuan hukum tersebut untuk dapat melindungi masyarakat serta menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang dicita-citakan, tidak akan terwujud. Meskipun pembangunan ekonomi berhasil, dimana ekonomi memang merupakan pilar penting dalam kemakmuran, namun hukum akan menentukan bagaimana kemakmuran menjadi kesejahteraan yang dinikmati secara adil dan merata. Di samping itu, hukum juga mengatur bagaimana keadilan sosial diwujudkan, dan kemajuan dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR. Hibnu Nugroho, S.H.,MA, Bapak Prof. Dr. Rianto Adi, S.H.,MA, Ibu DR. Farhana, S.H.,M.H.,Bapak DR. Hadi Supraptikta, Bapak DR. Ridwan Nurdin, MA selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2017

Redaksi

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Otom Mustomi (The lecturer of the Law Faculty of Jakarta Islam University)

THE CHANGE OF LEGAL CULTURE ORDER ON INDIGENOUS PEOPLE OF BADUY TRIBE IN THE BANTEN PROVINCE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 309-328

This research aims to elaborate the geographical state of the Baduy Tribal Legal culture of Banten Province, and then also reveals about a legal culture of Baduy people life change, thoroughly. It analyzes the tribal legal culture in Indonesia, looks over on causes of legal changes of Baduy tribe kinship life in Banten province as part of Sunda tribe in Banten province. This research uses normative juridical method analyzing qualitatively using secondary data related to legal culture system of Baduy tribe in Banten province. The result of this research that is the village of Baduy tribe still part of Sunda tribe commonly not much different with another Sunda tribe. In particular, distinguishing the Baduy Tribe of Banten Province with another Sunda tribes are the ways of dressing and the implementation of tradition as part of the culture of law that still firmly hold the legal culture that comes from the habit of the roots of their ancestor tradition that still well-maintained. They are still tied to the customary tradition of internal marriage, prioritizing customary law and "ulayat" rights that almost extinct as it happens in some regions in Indonesia. They absorb and sorting out external effects such behavior from outside society including television, encourage the youth to go school as long as it does not impair their legal culture order.

Keywords: custom of the Baduy Tribe, legal culture

Ahmad Jazuli (A researcher of Centre for Policy Research and Development, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

CONFLICT ACCOMPLISHMENT OF BLASPHEMY IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 329-350

The high number of cases related to violations of freedom to worship religion and belief (blasphemy) which committed by an organization, apparatus, or individual and ambiguous of rule associated with the position of religion within the state has led polemic in a society that threatens intolerance and discrimination. This research is juridical normative and using library literature that aimed to answer questions about this research on how to solve the conflict of blasphemy in perspective of Indonesia's criminal law, by reviewing that rule to get a picture (a descriptive analytical), how to resolve that conflict in Indonesia justice system in order to bring restorative justice into reality. The result of this research shows that national regulation related to freedom of religion and belief still do in partial and tend to subjective so can lead a multi-interpretation among government and society; that conflict occurs because the government do not implement the freedom of religion and belief, strictly according to the law; and the rule is still normative both content and concept, so it has not implemented very well.

Keywords: conflict, blasphemy, criminal law

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Novita Sari (A Reseracher of The National Anti Narcotics Agency)

APPLICATION OF ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLES IN LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACT OF NARCOTICS ABUSES

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 351-363

The problems of abuses and narcotics trafficking need a serious attention from government particularly a policy that can be implemented and its sanction. The number of concerns in narcotics criminal act handling cases becomes the reason for the writer to research a government policy that has been run and its obstacles. This research uses a normative juridical method. The results of this research are the ultimum remedium principles gives spaces to the government to apply an alternative policy than criminal sanctions. The application of rehabilitation sanction of narcotics suspects is a realization from that principles but in its application still, finds handicaps such as lack of coordination among related ministries/institutions which take care narcotics suspects in litigation. Through the existing of regulation, then it is expected that its application can be right on target and done well.

Keywords: narcotics, sanction, ultimum remedium, rehabilitation

Ulang Mangun Sosiawan (A researcher of Centre for Law Research and Development, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

THE COUNTERMEASURE EFFORTS OF RIOT AT THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 365-379

Lately, riots occur at the correctional institutions, tend to increase and become restless. Any efforts have been taken to solve the problems such as improvement of facilities and infrastructure to overcome the over-capacity condition at correctional institutions. But, that efforts conducted by the Directorate General of Corrections have not maximized and come to the root of the problem, yet. The questions of this research are what the causes of that riot? How the riot countermeasure and the actions will be taken to anticipate on? This research uses empirical, normative juridical method which researches primary and secondary data. The results of this research show that the factors of riot caused by (1) over capacity and the proportion of officers and convicts are too high (2) the lack of officers understanding about human rights values, officers do their task without standard operating procedure but work by habits and do not pay attention to convicts needs (3) the welfare of the officers and a strong will of the prisoners to get free can lead a tendency to an excessive personal relationship between them and probably make collusion, different treatment, unfair competition, and feelings of envy (4) the situation and conditions of monotonous and long period of time, boredom, prolonged stress, apathetic behavior, lazy, disobedient. The recommendation of this research that is: it is necessary to relocate to build correctional institutions ; improvement of human resources of correctional officers; fulfillment of basic needs of convicts (WBP) such as food, clothes and dwelling; and it is needed to revise the Law No. 12/ 1995 on Corrections.

Keywords: countermeasure of riot, correctional institution

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Penny Naluria Utami (A researcher of the Centre for Human Rights Reserach and Development the Agency of Research and Development of Law and Human)

JUSTICE FOR CONVICTS AT THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 381-394

Public highlights correctional institutions due to various problems, starting from over capacity and illegal charges. This research is conducted in the Directorate General of Corrections where rules and or policies have been made and issued. The main problem of this research is how the development of patterns and ways of inmates in correctional institutions and how human rights principles have been integrated into the decision-making of correctional management. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. The results of research show that there is the problem in practice of conditional rights, conditionals and terms ruled in the Government Regulation Number 99/2012 tend to disharmony with the Law Number 12/1995 on Correctional so it can postpone or negate certain rights for a period of time. Based on that research, can be taken some recommendation namely do amendment the Law Number 12/1995 on Correctional, particularly relating to convicts`s rights, invite the society, private companies, state-owned enterprises (BUMN) to engage and contribute to the development of them.

Keywords: convict, development, regulation

Oki Wahyu Budijanto (A researcher of Centre of Research and Development of Human Rights, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

DECENT WAGES FOR LABORERS IN LAW AND HUMAN RIGHT'S PERSPECTIVE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 395-412

In defining the minimum wage standard, government/local government sometimes take sides with employers that finally makes them get a strike. The question of this research is how the decent wages for the laborers in law and human rights`s perspective? The purpose of this research is to know the decent wages for the laborers in law and human rights`s perspective. This research is a normative juridical through library study. The result of this research can be found out that Indonesia cannot define the wages as the principles of decent wages based on human rights, yet. But, the government keeps to taking a progressive effort to regulate salary for the laborers and also pay attention to the employers to the sustainability of their companies in order to develop and grow in global competitiveness. The government always take care to maintain economic stability and keep support the high economic growth and sustainable. The welfare of laborers is not dependent a number of wages received, but also about state social facilities that contribute to reducing their cost of living. The state contributes to facilitating in development and supervision of a bipartite social dialogue between the employers and the laborers.

Keywords: decent wage, law and human rights

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin (The lecturer of the Law Faculty of the University of Tompotika Luwuk, The Central Sulawesi and Managing Editor of Journal Dinamika Hukum at Faculty of Law on Jenderal Soedirman University)

THE JUDGE CONSIDERATIONS ON PRE-TRIAL JUDGMENT

Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investigation Termination of Criminal Act of Money Politic

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 413-425

The purpose of this research is to analyze the Verdict Number: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investigation Termination of Criminal Act of Money Politic in Luwuk Regency. This research method is juridical normative. It concludes that the judge consideration at that verdict on Investigation Termination Number SP.Sidik/106.al/IX/2016/Ditreskrimum on dated 13 September 2016, according to the court, the appeal of the termination of the investigation conducted by "termohon, not based on law. The execution of that pre-trial judgment, basically, the judge consideration has been able to carry on when it becomes binding.

Keywords: *verdict, pre-trial, investigation, money politic*

Mei Susanto (The lecturer of the Department of Constitutional Law of the Law Faculty, the Padjajaran University)

THE DISCOURSES REVIVE THE DPSP IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM OF INDONESIA

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 3, Page 427-445

This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) as a national development planning guideline that is often contrary with a presidential system. The problem research, first what is the legal form of DPSP that does not conflict with the presidential system? Second, what are the legal implications of DPSP violations by the President according the presidential system? By using normative legal research methods, this research concluded that DPSP is not always in conflict with presidential system by placing it in the constitution. The legal form DPSP in the constitution makes national development planning not only the preident domain, but result of mutual agreement in accordance with the social basis of the pluralistic Indonesian society. The DPSP violations cannot have implications for dismissal of the President, because DPSP is still a morally binding guide. The legal system for evaluating DPSP violations can be through the MPR by ordering the House of Representatives to effectively use parliamentary budgetary rights or the Constitutional Court with judicial review or constitutional complaint. The Revive of DPSP can be done by amendment the 1945 Constitution by the MPR.

Keywords: *constitution, directive principle of state policies, presidential system*

**Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Otom Mustomi (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta)

**PERUBAHAN TATANAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY
PROVINSI BANTEN**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 309 – 328

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di Indonesia, menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan sistem budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budayanya yang bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Seperti masih terikat tradisi adat perkawinan internal, memprioritaskan hukum adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. ternyata Suku Baduy Provinsi Banten juga mampu mempertahankan eksistensinya dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap rongrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berperilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat komunikasi informasi seperti menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarananya Pemda Jawa Barat berkewajiban untuk mempertahankan budaya hukum masyarakat Suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan devisa wisatawan yang datang secara individu.

Kata Kunci: Adat Suku Baduy, Budaya Hukum

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Ahmad Jazuli (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****PENYELESAIAN KONFLIK PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 329 – 350

Tingginya angka kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (“penodaan agama”) baik yang dilakukan atas nama organisasi, aparat, maupun individu, serta ambigunya peraturan terkait kedudukan agama dalam negara menimbulkan polemik di masyarakat yang mengancam intoleransi dan diskriminasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, dengan mengkaji peraturan hukum pidana yang berlaku dan untuk mendapatkan suatu gambaran (deskriptif analitis) bagaimanakah seharusnya penyelesaian konflik tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia guna mewujudkan *restorative justice*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik.

Novita Sari (Peneliti pada Badan Narkotika Nasional)**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 351– 363

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama masalah kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemberian sanksinya. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi alasan penulis untuk membuat penelitian terkait kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dan kendalanya, serta kebijakan apa yang lebih sesuai untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa secara kualitatif melalui studi pustaka dan pengalaman di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya asas *ultimum remedium* memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan alternatif dari sekedar pemberian sanksi pidana. Penerapan sanksi rehabilitasi bagi tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk realisasi dari asas *ultimum remedium* namun dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala diantaranya adalah kurangnya koordinasi diantara Kementerian/Lembaga terkait yang menangani tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika dalam proses peradilan. Melalui revisi peraturan yang sudah ada maka diharapkan penerapan asas *ultimum remedium* ini dapat tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: narkotika, sanksi, ultimum remedium, rehabilitasi

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ulang Mangun Sosiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

UPAYA PENANGGULANGAN KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 365– 379

Kerusuhan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini semakin meningkat dan meresahkan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti perbaikan sarana prasarana untuk menghadapi over kapasitas. Namun upaya yang ditempuh jajaran pemasyarakatan belum maksimal dan menyentuh akar permasalahan. Permasalahannya adalah Apa yang menjadi penyebab kerusuhan? Bagaimana upaya penanggulangan kerusuhan serta langkah-langkah mengantisipasinya? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder dan data primer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kerusuhan disebabkan karena, (1) over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi; (2) Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata, pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang perhatian terhadap kebutuhan narapidana; (3) Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya kolusi, perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial; (4) Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan, stress yang berkepanjangan, perilaku apatis, malas, tidak patuh. Upaya penanggulangan dan mengantisipasinya dengan cara preventif dan represif. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah pentingnya relokasi ulang pembangunan lembaga pemasyarakatan; peningkatan SDM petugas pemasyarakatan; pemenuhan kebutuhan dasar WBP berupa pangan, sandang dan hunian; serta Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Penanggulangan Kerusuhan, Lembaga Pemasyarakatan

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Penny Naluria Utami (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 381 – 394

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana semua aturan dan atau kebijakan terkait pemasyarakatan dibuat dan dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak-hak Narapidana masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak bersyarat. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak narapidana, yang mana beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak harmonis dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mengajak masyarakat, perusahaan swasta dan BUMN untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembinaan narapidana sehingga warga binaan mendapatkan kesempatan kedua.

Kata kunci: Narapidana, Pembinaan, Regulasi.

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Oki Wahyu Budijanto (Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

UPAH LAYAK BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 395 – 412

Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan HAM. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan, hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kesejahteraan buruh tidak tergantung pada besaran upah yang diterima semata, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan.

Kata Kunci : Upah Layak, Hukum dan HAM

Hardianto Djanggih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk , Sulawesi Tengah)
Yusuf Saefudin (Managing Editor Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KEPUTUSAN PRAPERADILAN:

Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 413 – 425

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang di Kabupaten Luwuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa Pertimbangan hakim pada Putusan pengadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016, Penghentian penyidikan yang dilakukan termohon, menurut pengadilan tidak berdasar hukum. Pelaksanaan Putusan praperadilan Nomor:09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Putusan, Praperadilan, Penyidikan, Politik Uang

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Mei Susanto (Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN DALAM SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 3, Halaman 427 – 445

Penelitian ini membahas wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional yang sering dibenturkan dengan sistem presidensil. Permasalahan yang diteliti, *pertama* bagaimana bentuk hukum GBHN yang tidak bertentangan dengan sistem presidensil? *Kedua*, bagaimana implikasi hukum pelanggaran GBHN oleh Presiden sesuai sistem presidensil? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memperoleh kesimpulan GBHN tidak selalu bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk hukum GBHN dalam konstitusi membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama sesuai dengan basis sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Pelanggaran GBHN tidak dapat berimplikasi pada pemberhentian Presiden, karena GBHN masih bersifat panduan yang mengikat secara moral. Pranata hukum untuk mengevaluasi pelanggaran GBHN, dapat melalui MPR dengan memerintahkan DPR untuk menggunakan hak budget parlemen secara efektif atau Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* ataupun *constitutional complaint*. Penghidupan GBHN ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR.

Kata Kunci: GBHN, Sistem Presidensil